KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENANGANAN SAMPAH DI BANTARGEBANG

Ahmad Zilan Alkindy
NPP. 33.0365
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: zlnalkindy3@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA
Email nurliahnurdin@ipdn.ac.id

ABSTRACT

The high volume of waste generated by the Province of the Special Capital Region of Jakarta, reaching ,200–7,300 tons per day, has made the Bantargebang Integrated Waste Management Site the largest disposal location in Indonesia. Environmental impacts include groundwater contamination from leachate and methane gas emissions reducing air quality. Social impacts include acute respiratory infections, declining quality of life, and conflicts related to environmental justice and compensation. This study aims to analyze how collaboration between the two regional governments is carried out in waste management at the Bantargebang Integrated Waste Management Site, as well as the strategies employed by both governments. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Informants were determined using purposive sampling and snowball sampling techniques. Data analysis was conducted using Miles, Huberman, and Saldana (2014). The analysis used the Collaborative Governance Regime theory by Emerson and Nabatchi (2015), encompassing system context, drivers, collaborative governance dynamics (principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action), as well as collaborative actions and outcomes. The findings indicate that collaboration has been established within the Collaborative Governance Regime framework but has not operated optimally, influenced by a complex system context, drivers rooted in structural compulsion, and collaborative governance dynamics that remain ineffective across the aspects of principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. Although collaborative actions such as cooperation agreements and compensation provision have been carried out, outcomes remain limited characterized by recurring conflicts, low trust levels, and unresolved environmental impacts. Four strategies were formulated based on SWOT-CGR integration: cooperation agreement transformation and RDF technology development (SO), digital compensation reform and community participation expansion (WO), facilitative leadership strengthening and dispute resolution mechanisms (ST), and the establishment of an independent inter-regional collaboration unit and integrated environmental recovery programs (WT), so that collaboration becomes more effective, inclusive, and sustainable.

Keywords: *Collaboration; Collaborative Governance; Waste Management; Bantargebang Integrated Waste Management Site*

ABSTRAK

Tingginya volume sampah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mencapai 7.200–7.300 ton per hari menjadikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang sebagai lokasi pembuangan terbesar di Indonesia. Dampak lingkungan meliputi pencemaran air tanah dan emisi gas metana yang menurunkan kualitas udara. Dampak sosial antara lain ISPA, penurunan kualitas hidup masyarakat, serta konflik terkait keadilan lingkungan dan kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi kedua pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang serta strategi kolaborasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Analisis dilakukan menggunakan teori *Collaborative Governance Regime* oleh Emerson dan Nabatchi (2015) yang meliputi *system context*, *drivers*, *collaborative governance dynamics* (*principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*), serta *collaborative actions* dan *outcomes*. Kolaborasi telah terbentuk dalam kerangka *Collaborative Governance Regime* namun belum optimal, dipengaruhi oleh *system context* yang kompleks, *drivers* yang bertumpu pada keterpaksaan struktural, serta *collaborative governance dynamics* yang belum efektif pada aspek *principled engagement*, *shared motivation*, maupun *capacity for joint action*. Meskipun *collaborative actions* seperti pelaksanaan PKS dan pemberian kompensasi telah berjalan, *outcomes* masih terbatas ditandai konflik berulang, rendahnya kepercayaan, dan dampak lingkungan yang belum tertangani. Dirumuskan empat strategi berbasis *SWOT-CGR* meliputi transformasi PKS dan teknologi RDF (SO), reformasi kompensasi digital dan partisipasi masyarakat (WO), penguatan kepemimpinan fasilitatif dan mekanisme sengketa (ST), serta pembentukan unit kolaborasi mandiri dan pemulihan lingkungan terpadu (WT) agar kolaborasi menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kolaborasi; Tata Kelola *Kolaboratif*; Pengelolaan Sampah; Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan tantangan struktural yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, khususnya Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi menjadikan Jakarta sebagai penghasil sampah terbesar di Indonesia, dengan volume yang mencapai 7.200–7.300 ton per hari. Keterbatasan lahan di wilayah Jakarta yang hanya seluas sekitar 664 km² memaksa pemerintah provinsi untuk mengandalkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi sebagai solusi utama sejak tahun 1989.

Ketergantungan ini menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang serius, meliputi pencemaran air tanah akibat air sampah (lindi) yang merusak kualitas sumur warga, emisi gas metana dalam jumlah besar yang menurunkan kualitas udara, serta risiko longsor akibat akumulasi timbunan sampah. Dampak sosial yang ditimbulkan antara lain peningkatan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), penurunan nilai properti, dan konflik berulang antara

kedua pemerintah daerah terkait pembayaran kompensasi yang sering mengalami keterlambatan (Tamba & Sujastika, 2024).

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah diperbarui secara berkala. Namun dalam pelaksanaannya, kolaborasi ini menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sumber daya, rendahnya kepercayaan antaraktor, minimnya pelibatan masyarakat, dan forum koordinasi yang lebih bersifat administratif daripada substantif. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* untuk memahami dinamika kolaborasi secara holistik (Izza & Dwimawanti, 2025).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dari berbagai sudut pandang. Namun, kajian-kajian tersebut masih menyisakan sejumlah keterbatasan yang belum terjawab. Pertama, sebagian besar penelitian bersifat parsial dan hanya berfokus pada satu aspek tertentu seperti konflik kompensasi (Kushandajani, 2016), distribusi bantuan sosial (Tamba, 2024), atau partisipasi masyarakat (Izza & Dwimawanti, 2025) tanpa mengintegrasikannya dalam kerangka analisis yang komprehensif. Kedua, penelitian yang ada belum memotret secara mendalam keterkaitan antara faktor sistem, pendorong kolaborasi, dinamika tata kelola, serta tindakan dan hasil kolaborasi sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Ketiga, belum ada kajian yang secara eksplisit menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* (*CGR*) Emerson dan Nabatchi (2015) untuk menganalisis relasi Pemerintah Provinsi DKJ dan Pemerintah Kota Bekasi dalam konteks dinamika terbaru pasca-2024 yang mencakup sistem jembatan timbang *online*, rencana teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF), dan perkembangan kompensasi terkini. Keempat, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan analisis *SWOT* dengan kerangka *CGR* untuk menghasilkan strategi penguatan kolaborasi yang operasional dan berbasis bukti empiris lapangan. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang menjadi dasar dan justifikasi penelitian ini, sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini dalam mengisi kekosongan kajian tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah lintas wilayah di Indonesia.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berpijak pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dalam konteks tata kelola kolaboratif dan pengelolaan sampah perkotaan lintas daerah. Larasati & Puspaningtyas (2020) menemukan bahwa kerja sama melalui PKS di TPST Bantargebang belum optimal akibat keterlibatan sektor swasta yang terbatas, konflik kompensasi yang berulang, dan tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan. Kushandajani (2016) menemukan bahwa sumber konflik berasal dari ketidaksesuaian implementasi PKS, ketidakpuasan kompensasi, dan lemahnya komitmen politis yang memperdalam ketidakpercayaan antarpihak. Izza & Dwimawanti (2025) menemukan bahwa kolaborasi lebih bersifat *top-down* dan transaksional, di mana masyarakat hanya menerima informasi setelah kebijakan ditetapkan tanpa ruang yang memadai untuk menyampaikan masukan secara substansial. Tamba & Sujastika (2024) mengkaji perspektif keadilan distributif dan menemukan bahwa masyarakat sekitar menanggung beban sosial-ekonomi yang berat. Gimnastiar et al. (2023) menemukan

bahwa kolaborasi dapat berjalan efektif pada skala kelurahan bila didukung komitmen, kepercayaan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas, namun masih terkendala hirarki organisasi dan perbedaan kepentingan. Putri (2025) menemukan bahwa kolaborasi *multi-stakeholder* di Kota Parepare berhasil menekan volume sampah dengan dukungan regulasi yang jelas dan partisipasi masyarakat aktif. Ansell & Gash (2008) menekankan proses deliberasi multipihak, kepercayaan, dan komitmen bersama sebagai elemen penentu keberhasilan *collaborative governance*. Novalia, Suwarso & Nurdin (2025) menemukan bahwa koordinasi antarpemerintah daerah sering terhambat akibat perbedaan pemahaman dan lemahnya mekanisme tata kelola bertingkat. Napitupulu & Muhyidin (2021) menegaskan bahwa permasalahan sampah memerlukan kolaborasi *multi-aktor*. Rahayu et al. (2025) menegaskan urgensi pendekatan kolaboratif dan prinsip ekonomi sirkular dalam tata kelola sampah perkotaan di negara berkembang.

Dari tinjauan penelitian di atas, terdapat persamaan bahwa seluruh penelitian sepakat kolaborasi multipihak adalah kunci pengelolaan sampah perkotaan dan bahwa kepercayaan serta komitmen menjadi fondasi utamanya. Dari sisi perbedaan, penelitian-penelitian tersebut menggunakan kerangka teori yang beragam seperti model Ansell & Gash, perspektif keadilan distributif, atau analisis kebijakan parsial tanpa menerapkan *CGR* Emerson & Nabatchi (2015) secara utuh dan terpadu. Dari sisi keterbatasan, penelitian terdahulu belum menganalisis keempat komponen *CGR* secara terintegrasi, belum memotret dinamika terbaru paska-2024 termasuk inovasi jembatan timbang *online* dan rencana *RDF*, serta belum menghasilkan strategi penguatan kolaborasi berbasis analisis *SWOT-CGR* yang operasional. Kontribusi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan *CGR* secara sistematis dan menyeluruh, pengumpulan data lapangan tahun 2026, serta perumusan strategi *SWOT-CGR* yang dapat langsung diimplementasikan oleh kedua pemerintah daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki sejumlah kebaruan ilmiah yang membedakannya secara substansial dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, dari sisi pendekatan analisis, penelitian ini menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* (*CGR*) Emerson & Nabatchi (2015) secara utuh dan sistematis yang mengintegrasikan empat komponen sekaligus—system *context, drivers*, *collaborative governance dynamics*, serta *collaborative actions* dan *outcomes*—berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan kerangka analisis parsial atau berbasis model Ansell & Gash (2008) yang tidak secara eksplisit mengurai faktor-faktor sistem konteks dan pendorong kolaborasi. Kedua, dari sisi indikator analisis, penelitian ini secara spesifik menilai efektivitas jembatan timbang online sebagai inovasi transparansi dan rencana teknologi *RDF* sebagai upaya transformasi pengelolaan sampah—dua perkembangan yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya—sehingga menghasilkan gambaran yang lebih aktual dan kontekstual. Ketiga, dari sisi kontribusi teoritis, penelitian ini membuktikan bahwa *CGR* lebih komprehensif dibandingkan model Ansell & Gash dalam menganalisis kolaborasi yang bersifat asimetris, penuh konflik, dan lintas batas administratif seperti yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKJ dan Kota Bekasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi tidak selalu terbentuk atas dasar kesukarelaan *(voluntary collaboration)*, melainkan dapat bersifat *compelled collaboration* akibat tekanan struktural—sebuah kontribusi konseptual yang memperkaya literatur tata kelola kolaboratif. Keempat, dari sisi kontribusi praktis, penelitian

ini mengintegrasikan analisis *SWOT* dengan kerangka *CGR* untuk menghasilkan empat strategi penguatan kolaborasi yang operasional dan langsung dapat dirujuk oleh Pemerintah Provinsi DKJ, Pemerintah Kota Bekasi, pengelola UPST, serta pemangku kepentingan lainnya sesuatu yang belum dihasilkan oleh penelitian sebelumnya dalam konteks TPST Bantargebang.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menggunakan perspektif *CGR* dan merumuskan strategi kolaborasi yang komprehensif berbasis analisis *SWOT* yang terintegrasi dengan kerangka *CGR*.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks, dinamis, dan penuh muatan sosial-politik, sehingga memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika interaksi antaraktor dalam tata kelola kolaboratif. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama *(human instrument)* yang menggali data langsung dari lapangan.

Data diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2026 selama kurang lebih tiga bulan, mencakup tahap pengumpulan data lapangan, analisis, dan penulisan. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang dipilih menggunakan kombinasi *purposive sampling* dan *snowball sampling*, meliputi: (1) Kabid DLH Provinsi DKJ; (2) Plt. Sekretaris DLH Kota Bekasi; (3) Kabid Penanganan Sampah dan Kemitraan DLH Kota Bekasi; (4) Kasatlak UPST DLH DKJ; (5) Kepala UPST DLH DKJ; (6) Dosen ilmu pemerintahan; (7) Mahasiswa; (8) dan (9) Dua warga terdampak; (10) Supir truk sampah. Observasi dilakukan langsung di lokasi TPST Bantargebang, sedangkan dokumentasi mencakup PKS, laporan tahunan DLH, dan regulasi yang berlaku.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik validasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari pejabat pemerintah, akademisi, dan masyarakat terdampak. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap fenomena yang sama. *Member check* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali kepada informan kunci mengenai interpretasi data yang telah disusun. Kombinasi teknik keabsahan data ini dilakukan sesuai dengan panduan Sugiyono (2018) untuk menjamin kredibilitas dan dependabilitas penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regime* oleh Emerson dan Nabatchi (2015) yang mencakup empat komponen: *system context*, *drivers*, *collaborative governance dynamics* (*principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*), serta *collaborative actions* dan *outcomes*. Untuk merumuskan strategi, digunakan analisis *SWOT* yang diintegrasikan dengan kerangka *CGR*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menggunakan perspektif *Collaborative Governance Regime* yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi (2015).

3.1. Analisis *Collaborative Governance Regime*

3.1.1. *System Context*

Kolaborasi ini berkembang dalam konteks sistem yang kompleks. Pada dimensi kondisi sumber daya, terdapat ketimpangan asimetris antara kedua aktor: Jakarta memiliki kapasitas finansial besar namun menghadapi keterbatasan lahan kritis, sementara Kota Bekasi memiliki lahan Bantargebang namun menanggung beban dampak lingkungan dan bergantung pada kompensasi finansial. Hubungan ini lebih bersifat pertukaran kepentingan daripada kemitraan setara (Izza & Dwimawanti, 2025).

Pada dimensi tekanan eksternal, volume sampah Jakarta yang mencapai 7.200–7.300 ton per hari menciptakan kebutuhan mendesak yang memaksa keberlanjutan kerja sama. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan dari UPST DLH DKJ, aktivitas TPST menghasilkan akumulasi gas metana dan lindi yang berpotensi mencemari lingkungan secara serius, termasuk menjadi faktor risiko longsor. Kondisi ini dikonfirmasi oleh Napitupulu & Muhyidin (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang tidak memadai di TPA berskala besar dapat menimbulkan dampak lingkungan berlapis berupa pencemaran tanah, air tanah, dan udara yang membebani masyarakat sekitar (Napitupulu & Muhyidin, 2021). Dinamika sosial-politik menunjukkan bahwa masyarakat sekitar belum dilibatkan secara substantif dalam pengambilan keputusan, dengan pendekatan yang cenderung *top-down*. Kerangka kebijakan melalui PKS yang berlaku sejak 2009 lebih berfungsi sebagai instrumen administratif daripada panduan kolaborasi yang adaptif.

3.1.2. *Drivers*

Faktor-faktor pendorong kolaborasi dianalisis melalui empat elemen. Pertama, *leadership*: kepemimpinan masih cenderung bergantung pada hubungan personal antar pimpinan daerah (Gubernur dan Wali Kota), bukan pada sistem kelembagaan yang kuat. Kedua, *consequential incentives*: kolaborasi didorong insentif positif (ketersediaan lahan dan kompensasi Rp 360–365 miliar/tahun) dan *negative incentive* berupa tekanan sosial dan risiko konflik. Ketiga, *interdependence*: saling ketergantungan yang kuat namun asimetris menjadi *driver* utama keberlanjutan kolaborasi. Keempat, *uncertainty*: ketidakpastian akibat peningkatan volume sampah dan dinamika sosial belum dikelola secara adaptif. Secara keseluruhan, kolaborasi ini lebih didorong oleh keterpaksaan struktural daripada komitmen sukarela.

3.1.3. *Collaborative Governance Dynamics*

Pada aspek *principled engagement*, forum monitoring dan evaluasi bulanan yang tersedia belum mampu menjadi ruang dialog yang substantif dan inklusif—lebih bersifat formalitas teknis operasional. Masyarakat dan akademisi belum dilibatkan secara bermakna dalam proses deliberasi. Pada aspek *shared motivation*, tingkat kepercayaan antaraktor masih rendah akibat keterlambatan pembayaran kompensasi yang berulang. Perbedaan orientasi antara DKJ (fokus

teknis) dan Bekasi (fokus ekonomi/kompensasi) menunjukkan bahwa *mutual understanding* belum sepenuhnya terbentuk (Tamba, 2024). Pada aspek *capacity for joint action*, meskipun struktur kelembagaan melalui PKS dan sistem jembatan timbang *online* telah tersedia, kapasitas kolaborasi belum optimal karena koordinasi sistemik lemah dan partisipasi masyarakat sangat terbatas.

3.1.4. *Collaborative Actions dan Outcomes*

Tindakan kolaboratif yang telah dilakukan meliputi implementasi PKS, pemberian kompensasi kepada masyarakat, pelaksanaan forum monitoring dan evaluasi bulanan, serta penerapan sistem jembatan timbang *online* yang meningkatkan transparansi pengukuran volume sampah secara *real-time*. Ke depan terdapat rencana pengembangan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF).

Namun *outcomes* yang dicapai masih terbatas. Keberlanjutan kerja sama memang terjaga, tetapi fondasinya rapuh karena bertumpu pada keterpaksaan struktural. Tingkat kepercayaan antaraktor masih rendah, konflik berulang belum terselesaikan secara tuntas melalui mekanisme kolaboratif, dampak lingkungan terhadap masyarakat belum tertangani secara komprehensif, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi masih berada pada tahap berkembang dan belum mencapai *collaborative governance regime* yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

3.2. Strategi Kolaborasi Berbasis Analisis *SWOT-CGR*

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal yang diperoleh secara triangulasi dari hasil wawancara mendalam dengan 10 informan, observasi lapangan di TPST Bantargebang, dan telaah dokumen (PKS, laporan DLH, dan regulasi yang berlaku), dirumuskan empat strategi penguatan kolaborasi yang mengintegrasikan analisis *SWOT* dengan kerangka *CGR*. Faktor *Strengths* dan *Weaknesses* diidentifikasi dari kondisi internal kolaborasi berdasarkan pernyataan informan dari DLH Provinsi DKJ, DLH Kota Bekasi, dan pengelola UPST, serta diperkuat dengan data dokumentasi PKS dan sistem jembatan timbang *online*. Faktor *Opportunities* dan *Threats* diidentifikasi dari dinamika eksternal berdasarkan analisis regulasi yang berlaku, pernyataan informan akademisi, dan kondisi sosial-lingkungan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara warga terdampak. Seluruh faktor *SWOT* ini kemudian divalidasi melalui *member check* kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaiannya dengan realitas lapangan:

Tabel 1. Matriks *SWOT* Strategi Kolaborasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang

Faktor Internal / Faktor Eksternal	***STRENGTHS* (S)**	***WEAKNESSES* (W)**
	1. PKS telah berlangsung sejak 1989 dan diperbarui berkala setiap 5 tahun 2. Kapasitas finansial DKJ besar (kompensasi Rp 360–365 miliar/tahun) 3. Sistem jembatan timbang *online* untuk transparansi volume sampah 4. Forum monitoring dan evaluasi bulanan sudah berjalan rutin 5. DKJ memiliki kewenangan penuh dan SDM yang memadai	1. Kepercayaan antaraktor rendah akibat keterlambatan kompensasi berulang 2. Forum monev masih bersifat teknis dan formal, belum substantif 3. Kolaborasi masih bergantung pada figur pimpinan, bukan sistem 4. Partisipasi masyarakat sangat terbatas dalam pengambilan keputusan 5. PKS lebih administratif daripada adaptif terhadap dinamika lapangan 6. Perbedaan orientasi: DKJ fokus teknis, Bekasi fokus ekonomi/kompensasi
***OPPORTUNITIES* (O)**	**Strategi SO**	**Strategi WO**
1. PP No. 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah memberi landasan hukum kuat 2. Rencana pengembangan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) 3. Sistem jembatan timbang *online* dapat dikembangkan lebih lanjut 4. Tekanan global dan nasional untuk tata kelola lingkungan berkelanjutan 5. Potensi pelibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam kolaborasi	1. Transformasi PKS menjadi instrumen adaptif berbasis PP 28/2018 2. Pengembangan teknologi RDF didukung kapasitas finansial DKJ 3. Optimalisasi sistem jembatan timbang *online* sebagai basis kompensasi digital *real-time* 4. Pelibatan akademisi dalam forum monev agar evaluasi berbasis bukti	1. Reformasi mekanisme distribusi kompensasi melalui sistem digital transparan 2. Transformasi forum monev menjadi ruang dialog substantif dan penyelesaian konflik 3. Membangun sistem koordinasi permanen berbasis kelembagaan 4. Perluasan partisipasi masyarakat melalui forum komunikasi warga terorganisir
***THREATS* (T)**	**Strategi ST**	**Strategi WT**
1. Konflik berulang akibat keterlambatan kompensasi menurunkan kepercayaan 2. Volume sampah terus meningkat melampaui kapasitas pengelolaan 3. Pergantian pimpinan daerah mengancam stabilitas kolaborasi 4. Protes dan tekanan sosial masyarakat yang terus meningkat	1. Penguatan kepemimpinan fasilitatif berbasis sistem agar tidak tergantung figur pimpinan 2. Peningkatan konsistensi pembayaran kompensasi untuk cegah konflik berulang 3. Pengembangan teknologi pengolahan sampah atasi tekanan volume 4. Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka PKS	1. Penyusunan regulasi internal standar minimum partisipasi masyarakat dalam PKS 2. Penguatan sistem informasi publik untuk meningkatkan kepercayaan 3. Pembentukan unit khusus kolaborasi lintas daerah yang mandiri dari figur pimpinan 4. Program pemulihan lingkungan terpadu sebagai komitmen nyata terhadap masyarakat

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Strategi SO memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, mencakup transformasi PKS menjadi instrumen kolaborasi adaptif berbasis PP No. 28/2018, pengembangan teknologi RDF yang didukung kapasitas finansial DKJ, optimalisasi sistem jembatan timbang *online* sebagai basis kompensasi digital *real-time*, dan pelibatan akademisi dalam forum monev. Strategi ini memperkuat dimensi *collaborative actions* dan *outcomes* dalam kerangka *CGR*.

Strategi WO mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, mencakup reformasi mekanisme distribusi kompensasi melalui sistem digital transparan, transformasi forum monev menjadi ruang dialog substantif dan deliberatif, pembangunan sistem koordinasi permanen berbasis kelembagaan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Strategi ini memperkuat dimensi *principled engagement* dan *capacity for joint action*.

Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, mencakup penguatan kepemimpinan fasilitatif berbasis sistem kelembagaan, peningkatan konsistensi pembayaran kompensasi, pengembangan teknologi pengolahan sampah, dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa terstruktur dalam kerangka PKS. Strategi ini memperkuat dimensi *shared motivation* dan *principled engagement*.

Strategi WT meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman, mencakup penyusunan regulasi internal standar minimum partisipasi masyarakat dalam PKS, penguatan sistem informasi publik, pembentukan unit khusus kolaborasi lintas daerah yang mandiri dari figur pimpinan, serta program pemulihan lingkungan terpadu. Strategi ini memperkuat seluruh dimensi *CGR* secara bersamaan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan dan memperkuat berbagai penelitian sebelumnya. Kushandajani (2016) menemukan bahwa konflik pengelolaan sampah di TPST Bantargebang bersumber dari ketidaksesuaian implementasi PKS dan ketidakpuasan kompensasi—kondisi yang masih berlanjut hingga penelitian ini dilakukan pada 2026. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi kelembagaan yang mendasar, pola konflik berulang sulit dihentikan.

Izza & Dwimawanti (2025) menemukan bahwa proses kolaborasi bersifat *top-down* dan PKS lebih merupakan model *'take it or leave it'* daripada hasil deliberasi konsensual. Temuan ini dikonfirmasi oleh penelitian ini, sekaligus diperluas dengan analisis mengapa kondisi ini terjadi melalui lens *CGR*—yakni lemahnya *shared motivation* dan *principled engagement* sebagai komponen inti *collaborative governance dynamics*.

Berbeda dengan Gimnastiar et al. (2023) yang menemukan kolaborasi berjalan baik pada skala kelurahan dengan aktor homogen, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antardaerah dengan ketimpangan sumber daya yang signifikan memerlukan pendekatan yang jauh lebih kompleks. Sementara Muhammad et al. (2024) menekankan pentingnya *'small wins'* dalam membangun momentum kolaborasi—temuan yang relevan dengan rekomendasi pengembangan teknologi *RDF* sebagai langkah konkret yang dapat memperkuat kepercayaan.

Secara teoritis, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa *CGR* Emerson & Nabatchi (2015) merupakan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis kolaborasi yang kompleks, asimetris, dan penuh konflik. Model ini lebih unggul dibandingkan model Ansell & Gash (2008) karena mampu mengintegrasikan konteks sistem, faktor pendorong, dinamika kolaborasi, serta tindakan dan hasil dalam satu kesatuan analisis yang saling terhubung.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan sejumlah temuan menarik yang memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan. Pertama, sistem jembatan timbang *online* merupakan inovasi positif yang telah meningkatkan transparansi pengukuran volume sampah secara *real-time*, namun belum diintegrasikan secara optimal sebagai basis sistem pembayaran kompensasi digital. Dari perspektif teori *collaborative governance*, inovasi teknologi semacam ini berpotensi menjadi *bridging mechanism* yang memperkuat *shared motivation* antar aktor jika dikembangkan menjadi platform pertanggungjawaban publik yang dapat diakses oleh masyarakat terdampak. Temuan ini berkontribusi pada literatur tata kelola kolaboratif dengan menunjukkan bahwa transparansi berbasis teknologi dapat menjadi katalis pembangunan kepercayaan dalam kolaborasi yang sebelumnya didominasi ketidakpercayaan struktural.

Kedua, ditemukan bahwa keterlibatan generasi muda dan mahasiswa dalam proses kolaborasi meski masih sangat minim memiliki potensi besar sebagai agen sosialisasi, pemantauan kebijakan, dan advokasi masyarakat. Potensi ini belum dimanfaatkan secara strategis oleh kedua pemerintah daerah dan pengelola UPST, padahal dalam praktik pemerintahan daerah yang demokratis, pelibatan kelompok muda merupakan bagian dari penguatan partisipasi publik yang berkelanjutan.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa pola keterpaksaan struktural *(compelled collaboration)* yang ditemukan di TPST Bantargebang merupakan fenomena yang belum banyak dibahas dalam literatur *collaborative governance* di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam konteks pengelolaan sampah lintas wilayah, pemerintah daerah penerima dampak berada dalam posisi tawar yang lemah karena secara ekonomi bergantung pada kompensasi, sehingga tidak dapat dengan mudah menolak atau menegosiasikan ulang syarat-syarat kerja sama secara setara. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam *collaborative governance* antardaerah di Indonesia dan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dalam merancang kebijakan kerja sama daerah yang lebih berkeadilan.

IV. KESIMPULAN

Pertama, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang telah terbentuk dalam kerangka *Collaborative Governance Regime*, namun belum berjalan optimal. *System context* yang kompleks ditandai oleh ketimpangan sumber daya asimetris dan kerangka kebijakan yang belum adaptif. *Drivers* kolaborasi lebih bertumpu pada keterpaksaan struktural daripada komitmen sukarela, dengan kepemimpinan yang masih bergantung pada figur pimpinan. *Collaborative governance dynamics* belum efektif: *principled engagement* bersifat formal dan teknis; *shared motivation* lemah akibat rendahnya kepercayaan; *capacity for joint action* terhambat minimnya partisipasi masyarakat. Meskipun *collaborative actions* telah berjalan melalui PKS, kompensasi, dan sistem jembatan timbang *online*, *outcomes* masih terbatas ditandai konflik berulang, rendahnya kepercayaan antaraktor, dan dampak lingkungan yang belum tertangani.

Kedua, dirumuskan empat strategi penguatan berbasis analisis *SWOT* yang terintegrasi dengan kerangka *CGR*: Strategi SO memperkuat fondasi kolaborasi melalui transformasi PKS dan pengembangan teknologi *RDF*; Strategi WO mereformasi dinamika internal melalui sistem

kompensasi digital dan perluasan partisipasi masyarakat; Strategi ST membangun ketahanan sistem terhadap ancaman eksternal melalui kepemimpinan fasilitatif berbasis sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa; serta Strategi WT menciptakan fondasi kelembagaan yang inklusif melalui unit kolaborasi mandiri dan program pemulihan lingkungan terpadu. Keempat strategi ini secara bersama-sama diarahkan agar kolaborasi berkembang dari yang bersifat transaksional menjadi *collaborative governance regime* yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan demi terwujudnya pengelolaan sampah yang berkeadilan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif terbatas (10 orang) dan cakupan wilayah yang hanya berfokus pada DLH Provinsi DKJ dan DLH Kota Bekasi. Dinamika komunitas di empat kelurahan sekitar TPST Bantargebang belum dikaji secara mendalam secara individual.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa agenda penelitian lanjutan yang disarankan. Pertama, penelitian lanjutan dapat berfokus pada evaluasi implementasi teknologi *RDF* di TPST Bantargebang setelah beroperasi. Kedua, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas sistem kompensasi bagi masyarakat terdampak di empat kelurahan sekitar TPST Bantargebang menggunakan pendekatan *mixed methods*. Ketiga, studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki model pengelolaan sampah lintas wilayah serupa akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan model *CGR* yang lebih generalisasi dan dapat direplikasi. Keempat, penelitian tentang model kelembagaan unit kolaborasi lintas daerah yang independen dari rotasi kepemimpinan politik perlu dikembangkan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian. Terima kasih juga kepada seluruh informan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, UPST TPST Bantargebang, akademisi, dan masyarakat sekitar TPST Bantargebang yang telah bersedia memberikan informasi secara terbuka. Terima kasih kepada Rektor IPDN, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, Ketua Program Studi Politik Indonesia Terapan, serta seluruh civitas akademika IPDN atas dukungan selama masa pendidikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Badan Pusat Statistik. (2024). *Kota Bekasi dalam angka 2024*. BPS Kota Bekasi.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Provinsi DKI Jakarta dalam angka 2024*. BPS Provinsi DKI Jakarta.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.

Gimnastiar, M. F., Yuwono, T., & Marlina, N. (2023). Implementasi collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kalipancur, Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial, 13*(1), 446–463. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43088

Izza, F., & Dwimawanti, I. H. (2025). Proses collaborative governance pengelolaan sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 12*(1), 14–29. https://doi.org/10.26905/jiap.v12i1.14221

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 1593 Tahun 2021 tentang Penetapan UPST sebagai BLUD.

Khairi, H. (2022). Kepemimpinan fasilitatif dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Pemerintahan IPDN, 5*(2), 67–81. http://ejournal.ipdn.ac.id/JKMP/article/view/2022

Kompas.com. (2026, 9 Maret). *Dampak longsor di Bantargebang menurut ahli: Akumulasi gas metana hingga air lindi*. Kompas.com. https://lestari.kompas.com/read/2026/03/09/164453486/

Kushandajani, T. A. P. (2016). Konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1*(1), 1–23. http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/2016

Larasati, N., & Puspaningtyas, A. (2020). Manajemen tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang dengan konsep collaborative governance. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi, 8*(1), 69–80. https://doi.org/10.12928/channel.v8i1.15752

Muhammad, H. A., Hidayat, R., Pratama, D. F., & Wulandari, S. (2024). Collaborative governance in waste management at the reduce-reuse-recycle waste processing station. *Jurnal Administrasi Negara, 1*(2), 45–57. https://doi.org/10.21274/jan.2024.1.2.45-57

Napitupulu, M. H., & Muhyidin, A. (2021). Tantangan partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah kota berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17*(4), 385–397. https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34438

Novalia, W., Suwarso, R., & Nurdin, I. (2025). Connecting place and multilevel governance for urban river restoration. *Territory, Politics, Governance, 13*(2), 1–19. https://doi.org/10.1080/21622671.2024.2336608

Nurdin, N., & Indriani, R. (2023). Tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan hidup: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN, 10*(2), 45–62. http://ejournal.ipdn.ac.id/JIP/article/view/2023

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188).

Pitono, A. (2021). Reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik di era desentralisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik IPDN, 9*(1), 33–49. http://ejournal.ipdn.ac.id/JIAP/article/view/2021

Putri, N. R. (2025). *Kolaborasi multi-stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/20229/

Rahayu, I., Santoso, B., Fitriani, D., & Maulana, R. (2025). Transformasi kebijakan pengelolaan sampah plastik global pasca Global Plastics Treaty: Implikasi bagi regulasi nasional di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 8*(3), 3320–3326. https://doi.org/10.59581/jkpi-widyagama.v8i3.5678

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tamba, W. P. (2024). Distribusi kompensasi dampak TPST Bantargebang: Analisis keadilan distributif dan keadilan sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 25*(1), 1–18. https://doi.org/10.7454/jiks.v25i1.1234

Tamba, W. P., & Sujastika, I. (2024). Kebijakan pengelolaan sampah Jakarta di TPST Bantargebang. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 4*(2), 248–262. https://doi.org/10.7454/jiks.v4i2.5678

Tarigan, M. H. (2022). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam perspektif pemerintahan daerah. *Jurnal Politik Indonesia Terapan IPDN, 8*(1), 12–28. http://ejournal.ipdn.ac.id/JPIT/article/view/2022

Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. (1993). *Integrated solid waste management: Engineering principles and management issues*. McGraw-Hill.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2) dan (5).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).